



LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	14 (<i>empat belas</i>)
Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Virtual Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan RI
Hari, Tanggal	:	Rabu, 22 April 2020
Pukul	:	14.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Mohamad Hekal, M.B.A., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	1. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan realokasi dan <i>refocusing</i> APBN 2020 dalam penanganan wabah Covid-19; dan 2. Perlindungan hak-hak konsumen dalam perdagangan <i>online</i> terhadap dampak Covid-19.
Hadir	:	1. dari 53 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Sekretaris Jenderal, Bpk. Oke Nurwan, Dipl. Ing., 3. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Bpk. Suhanto, M.M., 4. Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Bpk. Indrasari Wisnu Wardhana, S.Kom., M.Si., 5. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Bpk. Veri Anggrijono Sutiarto, S.E., M.Si., dan 6. Kepala Badan Pengawas Perdagangan dan Berjangka Komoditi, Ibu Ir. Tjahya Widayanti, M.Sc., beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Virtual Komisi VI DPR RI pada pukul 14.51 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 22 April 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, M.B.A.
3. Sehubungan dengan wabah virus Covid 19, maka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilakukan secara virtual.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk menjalankan dengan efektif anggaran dan program Kementerian yang telah melewati proses realokasi dan *refocusing* serta menitikberatkan kinerja pada kebijakan perdagangan yang dirasakan langsung ke masyarakat, dalam rangka memaksimalkan keterbatasan anggaran kementerian untuk menghadapi pandemi Covid-19.
2. Komisi VI DPR RI meminta Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan RI untuk menata kembali anggaran rutin kementerian dalam rangka penghematan anggaran agar tercipta postur anggaran yang lebih efektif, efisien dan akuntabel di tengah pandemi Covid-19, dengan tetap mengedepankan program prioritas.
3. Komisi VI DPR RI meminta Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan RI untuk terus melakukan pengawasan terhadap transaksi *online* dan secepatnya membuat Permendag yang mengatur *Standar Operasional Prosedur (SOP)* , juklak dan juknis perdagangan transaksi online, sehingga aktivitas perdagangan *online* memiliki landasan hukum yang kuat dan melindungi hak-hak penjual dan pembeli dengan memperhatikan kondisi di tengah Pandemi Covid-19.
4. Komisi VI DPR RI meminta Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan RI untuk menginformasikan daftar penerima bantuan, serta bantuan apa saja yang diberikan kepada pasar-pasar tradisional dalam kaitan menghadapi Pandemi Covid-19.
5. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk mengefektikan dan meningkatkan sosialisasi tentang informasi berbagai *hotline* bagi masyarakat yang memiliki keluhan terkait pelayanan perdagangan dan perlindungan konsumen.
6. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.50 WIB.

Jakarta, 22 April 2020
PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,

TTD.

MOHAMAD HEKAL, S.E., M.B.A.
A-103